

## EFEKTIVITAS SISTEM PELAPORAN CEPAT BERBASIS GOOGLEFORM DI SATPOL PP PROVINSI JAWA BARAT

Gatot Sambas Junaedi\*

Satpol PP Provinsi Jawa Barat

gatotsambas89@gmail.com

Received: 24-06-2022, Accepted: 30-09-2022; Published Online: 07-11-2022

\*Corresponding author

### Abstrak

Satpol PP Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah melakukan transformasi digital. Transformasi digital diterapkan pada sistem pelaporan cepat berbasis *google form*. Sistem pelaporan cepat berbasis *google form* pada bulan Februari dan Maret tahun 2022 menunjukkan 95% dan 94,6% laporan dilakukan dengan tepat waktu sedangkan 5% dan 6,4% nya laporan dilaporkan danganterlambat. Efektivitas dianalisis melalui tiga pendekatan utama yaitu *resource approach*, *process approach*, dan *goals approach*. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala yang berkaitan dengan penerapan sistem pelaporan cepat berbasis *google form* seperti jaringan, pelaporan terlambat, dan motivasi kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Datadiperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Kasatpol PP Jabar, Sekretaris Satpol PP Jabar, Kasubag Umum dan Humas, Kasubag Perencanaan dan Staf terkait Adapun Teknis analisis datanya yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, rrvikasi dan kesimpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistempelaporan cepat berbasis *google form* di Satpol PP Provinsi Jawa Barat berjalan dengan efektif. Saran dalam penelitian ini adalah (a) pengembangan aplikasi secara mandiri, (b) aplikasi berintegrasi dengan aplikasi lainnya (adanya *agreement button*), (c) peningkatan pemahaman setiap individu dapat dilaksanakan melalui pelatihan singkat yang dilakukan secara berkala, dan (e) peningkatan motivasi didukung dengan penerapan *rewards* dan *punishment*.

**Kata kunci:** Efektivitas, Sistem Pelaporan Cepat, *Google Form*

### Abstract

The Satpol PP of West Java Province in carrying out its duties and functions has carried out digital transformation. Digital transformation is applied to a quick reporting system based on google forms. The quick reporting system based on google form in February and March 2022 showed 95% and 94.6% of reports were carried out on time, while 5% and 6.4% of reports were reported late. Effectiveness is analyzed through three main approaches, namely the resource approach, process approach, and goals approach. However, in its implementation there are still obstacles related to the implementation of a google form-based rapid reporting system such as networks, late reporting, and work motivation. The research method used is a qualitative research method. The data were obtained through interviews, observations, and literature studies, while the informants in this study were the Head of West Java Police Satpol, West Java Satpol PP Secretary, Head of General Affairs and Public Relations, Head of Planning and related staff. The technical analysis of the data were collection, reduction, presentation, verification and conclusion of data . The results of this study are that the google form-based rapid reporting system at the Satpol PP of West Java Province is running effectively. Suggestions in this study are (a) independent application development, (b) application integration with other applications (the existence of an agreement button), (c) increasing understanding of each individual can be carried out through short training conducted regularly, and (e) increasing motivation supported by the application of rewards and punishments.

**Keyword:** Effectiveness, Quick Reporting System, *Google Form*

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi didunia tak terkecuali di Indonesia terus saja berkembang dengan pesat dan cepat. Sehingga berdampak pada transformasi digital yang diterapkan di berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga melakukan transformasi digital dengan cara berinovasi untuk menghadirkan berbagai program kerja yang berbasis teknologi informasi (jabarprov.go.id, 2022). Salah satu instansi di Jawa Barat yang melakukan transformasi digital adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat atau disingkat Satpol PP Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 54 Th. 2016 mengenai tugas pokok, fungsi rincian tugas unit, dan tata kerja satuan polisi pamong praja menjelaskan bahwa salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan monitoring. Monitoring atau pemantauan merupakan proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur, dan mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi(Pergub No. 54, 2016).

Dalam mendukung tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Jawa Barat kemudian Satpol PP melaksanakan Transformasi digital dengan memanfaatkan *google form* sebagai bentuk dari pelaksanaan Monitoring. Transformasi ini dilakukan karena sebelumnya monitoring dan pelaporan hanya dapat dilakukan dengan cara manual. *Google form* akan menjadi sarana yang sangat menguntungkan sebagai dampak dari adanya transformasi digital di Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan dengan adanya *google form* maka dapat memaksimalkan sistem pelaporan dalam mengumpulkan informasi dan segera mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.

Kendati demikian, berdasarkan wawancara dan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terkait pelaksanaan pelaporan melalui *google form* masih ditemukan kendala seperti gangguan yang diakibatkan oleh jaringan, keterlambatan dalam pelaporan kegiatan, dan kurangnya motivasi kerja. Selain itu sumber daya manusia di Satpol PP Provinsi Jawa Barat juga terlihat belum siap untuk dapat menerapkan dengan maksimal sistem pelaporan cepat berbasis *google form*.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana efektivitas sistem

## TINJAUAN LITERATUR

### Konsep Efektivitas

Suatu organisasi yang merupakan gabungan dari struktur dan proses akan berupaya untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan, sehingga organisasi yang dibentuk selain menjadi unit sosial yang efisien, juga menjadi efektif. Untuk itu seringkali dikemukakan bahwa batu uji sebenarnya untuk menjalankan suatu organisasi yang efektif dan efisien adalah kemampuan mengorganisasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka untuk mencapai dan memelihara suatu tingkat kinerja yang efektif. Kata kunci pengertian ini adalah kata efektif karena pada akhirnya keberhasilan suatu organisasi diukur dengan konsep efektivitas.

Istilah maupun konsep mengenai efektivitas juga harus dibedakan dengan istilah efisiensi. Efisiensi mengandung pengertian bagaimana melakukan dengan baik (*doing things right*), atau seperti yang dikemukakan oleh James A.F. Stoner, et al (1995:9) bahwa efisiensi dapat diartikan sebagai kemampuan

pelaporan cepat berbasis *google form* di Satpol PP Provinsi Jawa Barat dalam bertugas di lapangan.

untuk meminimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan tertentu yang ingin dicapai (*doing the right things*).

Steers dkk (1985:77) mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi efektivitas organisasi, yaitu:

- a. Karakteristik organisasi seperti struktur dan teknologi;
- b. Karakteristik lingkungan seperti ekonomi, sosial, dan peraturan pemerintah;
- c. Karakteristik pegawai seperti prestasi kerja dan
- d. Kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek manajerial.

Di samping itu, Peters dan Waterman, Jr (1982 : 10) dalam bukunya *In Search Of Excellence* mengemukakan tujuh faktor yang dapat menentukan efektivitas suatu organisasi dalam melakukan tugas-tugasnya, yaitu faktor (1) sistem organisasi, (2) struktur, (3) strategi, (4) gaya kepemimpinan, (5)

staf/sumber daya manusia, (6) Keterampilan dan (7) pemilikan nilai (*share value*).

Konsep efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini secara sederhana mengacu pada rumusan yang dikemukakan oleh Budiani (2007:53) bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel diantaranya Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Pencapaian Tujuan Program dan Pemantauan Program.

Adapun Penjelasan terkait Variabel diatas yaitu:

- Ketepatan sasaran sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- Sosialisasi program informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- Pencapaian Tujuan program. Mengukur kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Pemantuan program kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai

salah satu bentuk evaluasi.

### **Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp)**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Di dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, diantaranya pada huruf e adalah ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Untuk itu, Pasal 255 mengamanatkan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

untuk menegakkan Perda dan Perkada, dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pengaturan lebih lanjut untuk pelaksanaan perintah undang-undang tersebut di Provinsi Jawa Barat didasarkan pada: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; dan (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Mengacu pada peraturan perundangan-undangan tersebut, maka secara teknis Satpol PP Provinsi Jawa Barat mempunyai tiga proses bisnis utama, yaitu penegakan Perda dan Pergub, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Dikaitkan dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Jawa Barat, maka Satpol PP Provinsi Jawa Barat berperan sebagai *leading sector* (sektor terdepan).

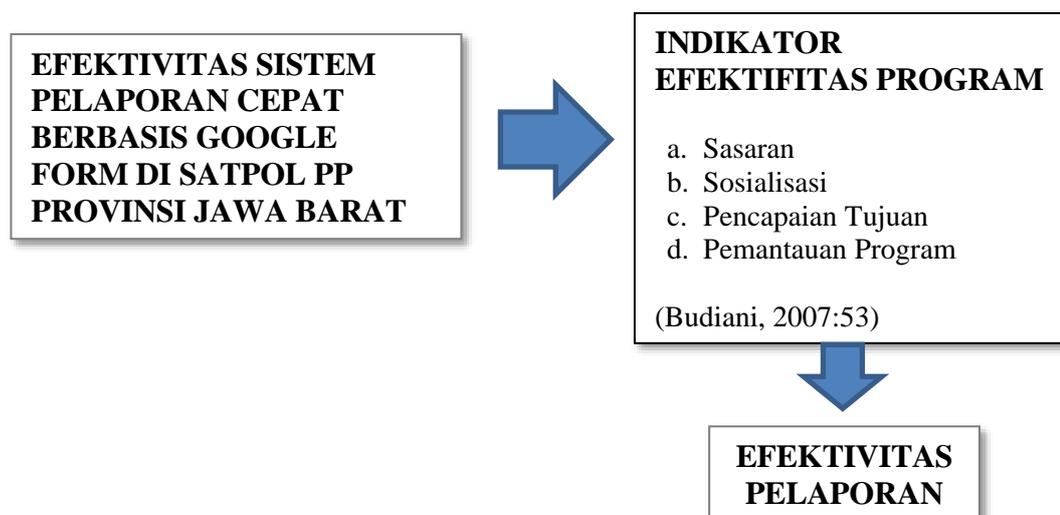
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mendefinisikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis masa kini dapat digambarkan sebagai abad informasi, memerlukan sistem manajemen informasi yang efektif dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif dari informasi yang tersedia. Sistem manajemen informasi bersifat esensial karena jumlah informasi yang harus diproses oleh organisasi meningkat secara signifikan (Svensson, 2012). Sistem manajemen informasi ini diperlukan oleh Satpol PP agar kebijakan dan keputusan pada tingkat strategis, taktis, dan operasional dapat mengikuti dan mengimbangi dinamika kemasyarakatan secara pre-emptif, preventif, dan represif.

Sistem manajemen informasi yang digunakan Satpol PP mengacu pada peraturan perundang-undangan,

diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan peraturan tersebut, pelaporan didefinisikan sebagai proses kegiatan penyelenggaraan laporan yang meliputi penentuan penggunaan sistem, prosedur, isi, format, jenis, sifat, waktu, evaluasi dan tindak lanjutnya (Kementerian Dalam Negeri RI, 2010). Implementasi peraturan tersebut memungkinkan pengembangan manajemen informasi yang selaras dengan kebijakan *e-government*.

Satpol PP Provinsi Jawa Barat mempunyai wilayah tugas meliputi 17 kabupaten dan 9 kota. Aktivitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi

Jawa Barat dan Satpol PP Kabupaten Kota memproduksi jumlah besar data elektronik, yang berarti jumlah informasi yang dihasilkan juga meningkat. Dalam kasus Satpol PP Provinsi Jawa Barat, koordinasi proses pelaporan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di antara fungsi dan entitas yang berbeda tidak selalu dilakukan dalam cara yang koheren, sehingga terjadi inkonsistensi dalam pengorganisasian dan penyimpanan informasi. Hal ini menyebabkan Satpol PP Provinsi Jawa Barat menghadapi masalah manajemen informasi, terutama proses pengorganisasian dan penyimpanan informasi elektronik, yang akan berdampak pada kualitas informasi. Dalam Penelitian ini Peneliti menggambarkan Kerangka Berfikir sebagai berikut:



## **METODOLOGI**

Metode kualitatif memberikan makna yang luas dan holistik terhadap variabel yang diteliti. Fokus penelitian tidak hanya pada hasil dan proses pencapaian hasil, namun termasuk juga aspek lain yang juga turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian hasil tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor (Moleong, 2012:4) bahwa seorang peneliti harus berusaha mengkaji tidak hanya dari sisi aspek variabel saja, namun juga mengkaji lingkungan yang ada dari variabel tersebut termasuk orang-orang yang ada didalamnya. Selanjutnya penulis akan memberikan gambaran dengan secara cermat tentang fenomena yang terjadi mengenai bagaimana Efektivitas Sistem Pelaporan Cepat Berbasis Google Form Di Satpol PP Provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah pejabat hingga perangkat kerja dan komponen penyusun di Satpol PP Provinsi Jawa Barat diantaranya Kasatpol PP Jabar, Sekretaris Satpol PP Jabar, Kasubag Umum dan Humas, Kasubag Perencanaan dan 2 (dua) staf terkait.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti

untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dimana data yang diperoleh harus mendalam, jelas dan spesifik. Dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara

Dalam bukunya Moleong (2007:248) Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dimana kita bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, kemudian mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang harus dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam Penelitian ini analisis data dimulai dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data disini juga menggunakan Model Miles dan Huberman yaitu dengan reduksi dimana dengan melakukan pemilahan,

pemusnahan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data, memilih dan mengelompokkan data serta membuang data yang tidak diperlukan sedangkan data display yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat teks yang bersifat Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Data Demografi**

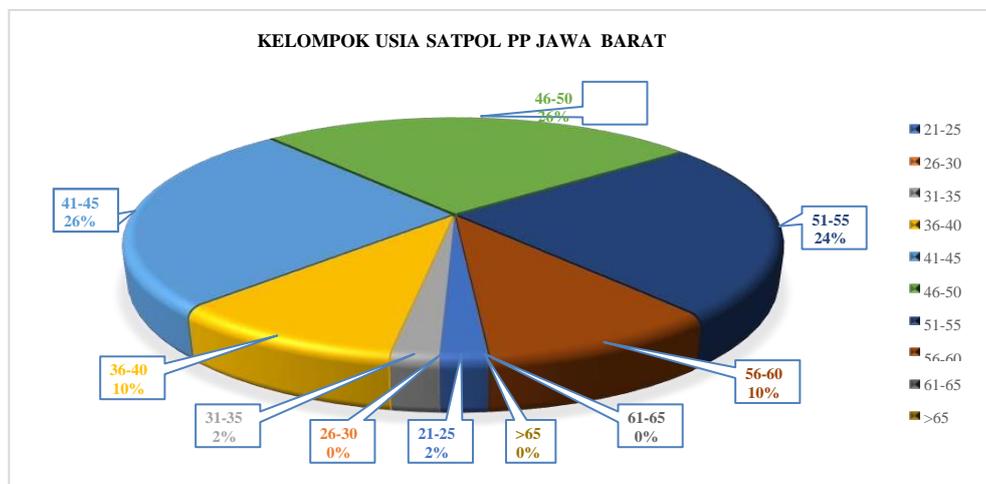
Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data demografi anggota Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Data demografi meliputi data usia dan tingkat pendidikan. Analisis data demografi dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah usia dan tingkat pendidikan merupakan faktor yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas dalam penerapan sistem pelaporan cepat berbasis *google form* di Satpol PP

Provinsi Jawa Barat. Analisis dilakukan dengan memahami data yang didapatkan yaitu pelaporan yang dilakukan dengan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu. Kemudian dianalisis menggunakan studi literatur dari beberapa jurnal yang peneliti dapatkan. Berdasarkan data pelaporan yang dilakukan anggota Satpol PP Provinsi Jawa Barat pada bulan Februari dan Maret tahun 2022 menunjukkan 95% dan 94,6% laporan dilakukan dengan tepat waktu, sedangkan sisanya pelaporan dilakukan dengan terlambat (Satpol PP Jabar, 2022a).

### **Kelompok Usia**

Dibawah ini merupakan diagram yang menunjukkan penyebaran usia anggota Satpol PP Jawa Barat. Adapun total anggota Satpol PP Jawa Barat secara keseluruhan adalah 100 orang. Berikut adalah diagramnya;

**Diagram 1.**  
**Kelompok Usia Satpol PP Jawa Barat**



Sumber: Satpol PP Jabar, 2022

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa anggota Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang berusia 21-25 tahun dan 31-35 tahun sejumlah 2 orang. Usia 36-40 tahun dan 56-60 tahun sejumlah 10 orang. Kemudian mereka yang berusia 51-55 tahun sejumlah 24 orang. Anggota Satpol PP didominasi oleh mereka yang berusia 41-45 tahun dan 46-55 tahun sejumlah 26 orang.

Penelitian yang dilakukan oleh R.A. Supriyono mengenai pengaruh usia terhadap kinerja menjelaskan bahwa usia berpengaruh terhadap kinerja seseorang (R.A. Supriyono, 2006). Riset hubungan antara usia dan kinerja menunjukkan hasil campuran atau tidak konsisten (Chiu, W. C. K. et al., 2001). Berdasarkan kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa usia dapat berpengaruh terhadap kinerja

seseorang dan ada juga yang menunjukkan bahwa usia tidak berpengaruh terhadap kinerja seseorang.

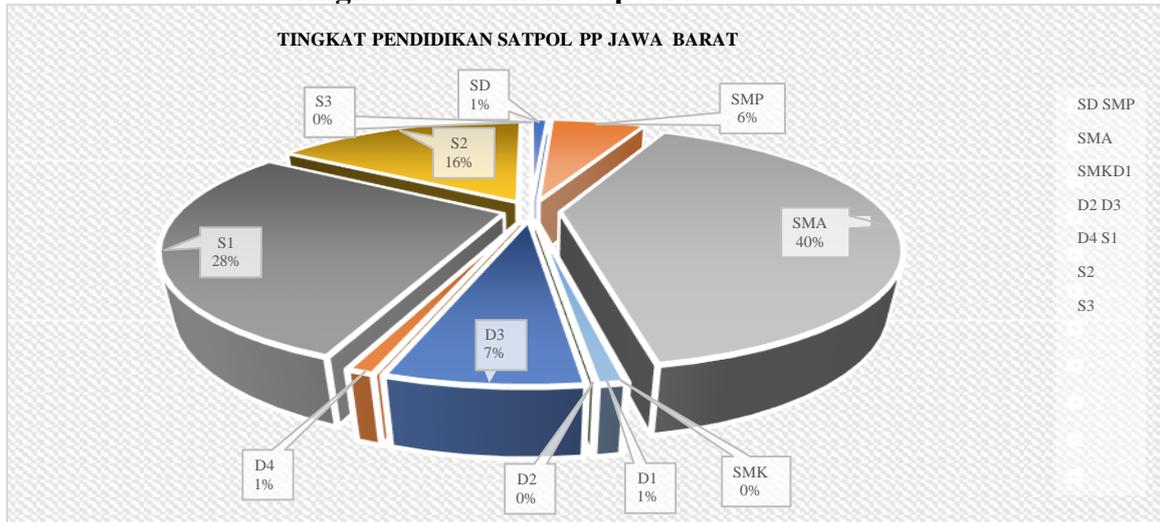
Pada penelitian ini, peneliti tidak menemukan masalah yang signifikan dalam penerapan sistem pelaporan cepat berbasis *google form* berkaitan dengan usia. Artinya usiabukan kendala dalam penerapan sistem pelaporan cepat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Claudia dan Tjandra yang menjelaskan bahwa manusia yang berusia dewasa muda (18-40 tahun) memiliki intelegensi yang matang dan dapat diperkirakan mudah untuk beradaptasi dalam perkembangan teknologi khususnya transformasi digitalisasi (Geraldine Claudia & Tjandra, 2018).

## Tingkat Pendidikan

Anggota Satpol PP Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat pendidikan yang

berbeda- beda. Di bawah ini merupakan tingkat pendidikan anggota Satpol PP Provinsi Jawa Barat.

**Diagram 2.**  
**Tingkat Pendidikan Satpol PP Jawa Barat**



Sumber: Satpol PP Jabar, 2022

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, anggota Satpol PP didominasi oleh mereka yang memiliki pendidikan terakhir SMA yaitu sejumlah 40 orang, kemudian mereka yang lulusan S1 sejumlah 28 orang, dan S2 sejumlah 16 orang. Anggota Satpol PP lainnya memiliki pendidikan terakhir D3 sejumlah 7 orang, SMP 6 orang dan mereka yang memiliki pendidikan terakhir D4, D1, dan SD masing-masing berjumlah 1 orang.

Pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh (Mandang et al.,

2017). Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai (Juliana et al., 2015). Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan cara sistematis, programatis dan berjenjang sehingga menghasilkan individu yang berkualitas (Hasan, 2005). Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan perilaku, selain itu pendidikan juga berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan dan aspek-aspek perilaku lainnya kepada generasi muda (Nasution, 1999).

Berdasarkan data yang dimiliki mengenai tingkat pendidikan di Satpol PP Provinsi Jawa Barat didominasi oleh SMA, S1 dan S2. Secara tingkat pendidikan para anggota

Satpol PP memiliki tingkat pendidikan yang baik ditambah memiliki pengalaman yang baik sejak bertugas di Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Sehingga dalam melaksanakan pelaporan cepat berbasis *google form* tidak memiliki kendala yang berarti dalam hal memahami instruksi maupun pengisian pelaporan ke *google form*. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Juliana et al., 2015).

### **Teknis Pelaporan Cepat Berbasis *Google Form***

Teknis pelaporan cepat merupakan penjelasan peneliti mengenai pelaksanaan dari sistem pelaporan cepat dengan menggunakan *google form* di Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Sedangkan *google form* adalah layanan yang diberikan oleh *google* untuk memudahkan penggunaannya dalam membuat survei kuesioner, formulir, atau semacamnya dengan basis online atau digital. *Google form* memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai pekerjaan dalam transformasi digital (Seretta, 2022). Keuntungan penggunaan *google form*

adalah masih dapat digunakan dengan gratis, artinya tidak membutuhkan biaya yang besar namun bisa bermanfaat dan berguna untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dengan mudah dan cepat karena dapat digunakan dimana saja. Namun dengan catatan harus terkoneksi ke jaringan yang stabil.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pejabat hingga perangkat kerja dan komponen penyusun di Satpol PP Provinsi Jawa Barat bahwa teknis yang dilakukan dalam pelaksanaan pelaporan cepat berbasis *google form* adalah dengan membentuk tim. Di dalam satu tim terdiri dari 10-20 orang yang terbagi menjadi ketua tim, Sarana dan Prasarana (SARPRAS), dokumentasi, dan lain sebagainya. Untuk mereka yang menginput ke data sistem pelaporan *google form* adalah mereka yang bertugas sebagai pelapor. Sebagai pelapor biasanya berasal dari tim perencanaan sedangkan untuk SARPRAS berasal dari bagian umum dan dokumentasi berasal dari tim Hubungan Masyarakat (HUMAS). Kemudian untuk anggota berasal dari Perlindungan Masyarakat (LINMAS), penegakan Perda dan Perkada (GAKDA), dan lain sebagainya (Rachman & Afrizal, 2022).

Ketua tim akan dijadikan penanggung jawab sesuai dengan surat

perintah atau surat tugas. Ketika sudah diberikan tugas kepada ketua tim, maka ketua tim akan membagi tugas kepada masing-masing anggota. Ketika anggota membuat *draft* pelaporan, maka *draft* tersebut harus dicek kembali oleh ketua tim (Hendra, 2022). Pelaporan berkaitan dengan penindakan seperti protokol kesehatan (*mall*, tempat wisata, dan lain sebagainya), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan lain sebagainya yang berkaitan dengan

penegakan Perda dan Perkada. Sistem pelaporan dilaksanakan dengan terbatas waktu setiap harinya yaitu 18.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa proses input pelaporan dapat dilakukan melalui *link google form* yang telah ditentukan. Petugas hanya tinggal klik link tersebut dan kemudian akan muncul bagian dan kolom-kolom. Adapun visualisasinya dapat tergambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.**  
**Visualisasi Input Pelaporan**



The image shows a screenshot of a Google Form titled "Laporan Cepat Pimpinan". At the top, there is a header image of police officers in uniform. Below the title, the user's email address "yoga.drkunhan@gmail.com" is displayed with a "Switch accounts" link. A warning message states: "The name and photo associated with your Google Account will be recorded when you upload files and submit this form. Your email address is not part of your response." Below this, there is a section titled "DATA UMUM" with two required fields: "Kepada \*" and "Dari \*". The "Kepada \*" field has a placeholder example: "Contoh: Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat" and a text input field labeled "Your answer". The "Dari \*" field has a placeholder example: "Contoh: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Satpol PP Provinsi Jawa Barat" and a text input field labeled "Your answer".

Gambar 1 menggambarkan input data melalui *google form*. Input pelaporan terdiri dari tiga bagian yang wajib diisi. Ketiganya adalah bagian data umum, kegiatan, dan dokumentasi kegiatan sebagai lampiran. Pada gambar diatas menggambarkan pelaporan yang

memuat informasi data umum yang meliputi “kepada” dan “dari”. Maksud dari kolom tersebut adalah bahwa “kepada” menunjukkan laporan tersebut ditujukan kepada siapa sedangkan “dari” adalah siapa yang melaporkan kegiatan di hari tersebut.

**Gambar 2.**  
**Visualisasi Proses Pelaporan**

The image shows a digital reporting form with several sections. Three callout boxes are present:
 

- Callout 1:** Points to the 'KEGIATAN' section, which includes fields for 'Tanggal Laporan Dibuat' (Date of Report), 'Dasar Kegiatan' (Activity Basis), 'Nama Kegiatan' (Activity Name), and 'Hari Kegiatan' (Activity Day).
- Callout 2:** Points to the 'Tanggal Kegiatan' (Activity Date) field, which is a date picker.
- Callout 3:** Points to the 'Dasar Hukum' (Legal Basis) field, which contains a reference to a government regulation.

 Other visible fields include 'Waktu Kegiatan' (Activity Time), 'Tempat Kegiatan' (Activity Location), 'Peserta Kegiatan' (Activity Participants), 'Your answer' text boxes, and 'Nama Pembuat Laporan' (Reporter Name) and 'NIP Pembuat Laporan' (Reporter ID) fields.

Gambar 2 merupakan kelanjutan dari input data pelaporan pada gambar 1. Melanjutkan input data pada data umum terdapat kolom “tanggal” yang memiliki makna tanggal pelaporan dibuat. Selanjutnya adalah bagian kegiatan yang memuat “dasar kegiatan”, “nama kegiatan”, “hari kegiatan”, “tanggal kegiatan”, “waktu kegiatan”, “tempat kegiatan”, “peserta kegiatan”, “dasar

hukum”, “hasil kegiatan”, “nama pembuat pelaporan”, dan “NIP pembuat pelaporan”. Pada kolom bagian kegiatan terdapat berbagai kolom yang telah disebutkan diatas, hal tersebut memiliki makna inti dalam pelaporan di setiap harinya. Artinya pada bagian kegiatan memuat informasi penting atau informasi utama yang harus dilaporkan oleh para petugas di lapangan.

**Gambar 3.**  
**Visualisasi Input Pelaporan**

The image shows a Google Forms interface for reporting an activity. The form is titled "DOKUMENTASI KEGIATAN" and contains three sections for documentation, each with an "Add File" button. At the bottom, there is a "Submit" button and a "Clear form" link. The footer includes the Google Forms logo and a warning about passwords.

Gambar 3 merupakan tahap terakhir dari pengisian laporan cepat berbasis *google form*. Tahap terakhir ini merupakan bagian dokumentasi kegiatan. Pada bagian dokumentasi kegiatan ini memuat kolom dokumentasi 1 sampai dengan 3. Kolom dokumentasi ini dapat di isi dengan foto-foto kegiatan yang ukurannya tidak lebih dari 2 MB (*megabyte*). Bagian dokumentasi kegiatan bertujuan sebagai bukti bahwa petugas melaksanakan kegiatan dengan baik di lapangan. Setelah semua bagian dan kolom-kolom terisi maka pelapor harus menekan tombol "*submit*" yang berada di bawah ujung paling kiri. Ketika pelapor sudah menekan "*submit*" maka otomatis pelaporan terkirim ke *data based* dari

*google form* itu sendiri. pelaporan harus dilakukan dengan tepat waktu, apabila tidak dilakukan dengan tepat waktu maka akan mendapatkan sanksi.

Sanksi yang diberikan ketika tim telat melaporkan hasil laporannya adalah hanya diberikan teguran saja oleh pimpinan. Artinya belum ada aturan yang mengatur apabila laporan dilaksanakan dengan terlambat. Peneliti menilai bahwa hal tersebut tidak menjadikan mereka yang melaporkan tidak tepat waktu tidak jera dengan hanya diberikan teguran. Namun demikian berdasarkan data di bulan februari dan maret hanya 5% dan 6,4% tim anggota yang melaporkan laporan dengan terlambat (Satpol PP Jabar, 2022a). Sisanya sudah berjalan sesuai

harapan, yaitu tepat waktunya dalam melaksanakan pelaporan cepat berbasis *google form*.

### **Analisis Efektivitas Sistem Pelaporan Cepat Berbasis *Google Form***

Menurut Kusdi (2009) dalam penelitian yang dilakukan Kultsum menjelaskan bahwa efektivitas adalah sejauh mana organisasi mencapai berbagai sasaran (jangka pendek) maupun tujuan (jangka panjang) yang telah ditetapkan, yang mana penetapan sasaran maupun tujuan menggambarkan konstituen strategis, kepentingan subjektif penilai, dan tahap pertumbuhan organisasi (Kultsum, 2017). Sedangkan menurut Ravianto efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan (Ravianto, 2014).

Berdasarkan teori yang dijelaskan mengenai efektivitas, peneliti kemudian mengaitkan dengan efektivitas sistem pelaporan cepat berbasis *google form* di Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Sistem pelaporan cepat berbasis *google form* ini tentunya memiliki dasar dalam implementasinya. Selain menjawab tantangan kemajuan teknologi dengan adanya transformasi

digitalisasi, sistem pelaporan cepat berbasis *google form* ini juga memiliki tujuan yaitu baik yang berjangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan, peneliti kemudian menyimpulkan tujuan dari sistem pelaporan cepat dengan menggunakan *google form* ini adalah mempermudah pelaksanaan operasi atau patroli yang dilakukan Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan memudahkan tim yang bertugas untuk melaporkan segala bentuk informasi yang ada dilapangan dengan waktu yang cepat sehingga informasi akan diolah dengan cepat yang tentunya akan menghasilkan keputusan yang cepat juga.

Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Florenzia, 2013). Dengan kata lain, suatu organisasi dikatakan efektif apabila tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya telah tercapai. Martani dan Lubis berpendapat ada 3 (tiga) pendekatan utama untuk mengukur suatu efektivitas yaitu pendekatan sumber (*resource approach*) yang berarti berhasil dalam mencari sumber daya, pendekatan proses (*process approach*) yang berarti sudah sejauh mana tingkat

efektivitas program dari seluruh proses, pendekatan sasaran (*goals approach*) yang berarti pengukuran program telah mencapai hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas disini sebagai konsep untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Lagaligo et al., 2019).

Tujuan yang telah ditentukan oleh instansi atau lembaga pemerintah dalam hal ini adalah Satpol PP Provinsi Jawa Barat tentunya dapat diukur ke-efektifitasannya menggunakan teori yang telah dijelaskan oleh Florencia. Artinya peneliti akan menjelaskan bagaimana sistem pelaporan cepat berbasis *google form* di Satpol PP Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaannya. Berikut ini merupakan penjelasannya; (1) **pendekatan sumber (*resource approach*)**: sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi Jawa Barat sudah bisa dikatakan baik. Sehingga dalam pendekatannya tidak terjadi kendala baik dilapangan maupun pada saat pelaporan. Misalnya dalam pengerahan anggota untuk melaksanakan sistem pelaporan, mereka dibentuk tim dan diberikan surat penugasan,

(2) **pendekatan proses (*process***

***approach*)**: Sejauh ini, sistem pelaporan cepat sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Meskipun masih ada kendala dalam prosesnya. Namun tidak terlalu signifikan karena ini berhubungan dengan motivasi dan teknis dilapangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pada pendekatan terkait proses sudah berjalan dengan baik, dan (3) **pendekatan sasaran (*goals approach*)**: Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh peneliti, hasil analisis menjelaskan bahwa pada pendekatan sasaran sudah berjalan dengan baik. Apa yang telah direncanakan sudah berjalan sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan pada bulan february dan maret tahun 2022 menunjukkan 95% dan 94,6% laporan dilakukan dengan tepat waktu.

Namun demikian, berdasarkan pengolahan data wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan hambatan dalam pelaksanaan sistem pelaporan cepat berbasis *google form* di Satpol PP Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah; ***pertama*** sistem atau *server* dapatterkendala akibat banyaknya laporan, ***kedua*** motivasi para anggota untuk melaporkan pelaporan di lapangan, ***ketiga*** tidak adanya standarisasi dari tim

pelaporan serta apa saja yang diperlukan, **keempat** para anggota masih kurang paham mengenai IT (*Information Technology*), **kelima** faktor individu dalam mengelola laporan, **keenam** pelaporan tidak sinkron antara kecepatan pelaksanaan tugas anggota yang lain dengan yang bertugas sebagai pelapor tidak sinkron, **ketujuh** anggota dilapangan sangat sibuk sehingga tidak sempat melaporkan kegiatan dan menunggu dokumentasi kegiatan yang berlangsung dari operator pelaporan kegiatan, **kedelapan** pelapor masih sering bertanya tentang isi konten seperti dasar hukum padahal dasar hukum sudah tertera di surat penugasan, dan **kesembilan** pemilihan petugas pelaporan kerja masih bersifat acak (Gakda Satpol PP Jabar, 2022).

Pelaporan cepat dengan menggunakan *google form* memudahkan para anggota Satpol PP Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pelaporan. Ditengah perkembangan teknologi yang begitu cepat dan pesat memaksakan kita untuk dapat bertransformasi secara digital. Hal ini tentunya akan mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Perbandingan yang dapat dirasakan ketika sebelum dan sesudah menggunakan *google form* adalah

pelaporan menjadi seragam sehingga *template* pelaporan yang digunakan menjadi mudah dipahami sesuai kebutuhan. Selain itu juga dari segi waktu pelaporan akan lebih cepat, baik laporan dari internal maupun kepada gubernur.

## KESIMPULAN

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti baik data wawancara maupun observasi, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa sistem pelaporan cepat berbasis *google form* di Satpol PP Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan efektif. Namun demikian terdapat beberapakendala yang harus dibenahi dan dikembangkan lagi seperti misalnya kemampuan individu dalam melaporkan pelaporan, motivasi individu untuk segera melaksanakan pelaporan, koordinasi dan kolaborasi dengan semua orang yang terlibat, dan pemahaman individu dalam melaksanakan penugasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diupayakan untuk diterapkan demi menunjang perbaikan dalam sistem pelaporan cepat berbasis *google form* di Satpol PP Provinsi Jawa Barat.

Diantaranya:

1. Penggunaan *google form* sebagai layanan dari *google* memang praktis untuk digunakan, namun demikian peneliti memberikan saran kepada Satpol PP Jawa Barat untuk dapat mengembangkan aplikasi secara mandiri khusus untuk pelaporan cepat. Sehingga hal tersebut dapat mencegah hilangnya data akibat *cyber crime* dari orang yang kurang bertanggung jawab. Aplikasi yang dikembangkan dapat digunakan secara *offline*.
2. Aplikasi yang dikembangkan harus berintegrasi dengan aplikasi lainnya, sehingga mengurangi penarikan data berulang kali untuk upload ke aplikasi yang lain. Artinya semua pemangku kebijakan harus berperan aktif dalam melakukan pengecekan laporan supaya tidak terjadi kesalahan (adanya *agreement button*).
3. Peningkatan pemahaman setiap individu yang berkaitan dengan IT maupun tugasnya dapat dilaksanakan melalui pelatihan singkat yang dilakukan secara berkala. Peningkatan motivasi dalam melaksanakan sistem pelaporan cepat dapat menggunakan konsep *rewards* dan *punishment*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chiu, W. C. K., W., C. A., Snape, E., & T., R. (2001). *Age Stereotypes and Discriminatory Attitudes towards Older Workers: An East-West Comparison*. *Human Relations*, 621–629.
- Florencia, O. G. B. (2013). Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Lingkungan Hidup Pada Hotel Bintang Lima Di Kawasan Pariwisata Ubud Kabupaten Gianyar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.
- Gakda Satpol PP Jabar. (2022). *Hasil Wawancara Kabid, Kasi, dan Anggota Penegakan Perda dan Perkada*.
- Geraldine Claudia, D., & Tjandra, E. (2018). *Pengaruh Teknologi pada Produk Interior bagi Manusia Dewasa dan Lansia di Era 4.0*. <http://www.10decoracion.com/wp->
- Hasan, M. T. (2005). *Islam dan Masalah SDM*. Lantabora Press. Hendra.
- (2022). *Hasil Wawancara Bagian Kepegawaian*. [jabarprov.go.id](http://jabarprov.go.id).
- (2022). *Sekda Jabar: Transformasi Digital Diterapkan di Lingkup Provinsi Jawa Barat*.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. <https://jabarprov.go.id/index.php/news/45969/2022/03/03/Sekda-Jabar-Transformasi-Digital-Diterapkan-di-Lingkup-Provinsi-Jawa-Barat>
- Juliana, Hakim, L., & Mustari, N.

- (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Pegawai Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(April), 1–19.
- Kultsum, U. (2017). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Kerja Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pt. Trasti Global Konverta. *Journal of Business Studies*, 2(2), 121–132.
- Lagaligo, R. I., Luwu, K., Negara, I. A., Ilmu, F., Politik, I., & Djemma, U. A. (2019). *Efektivitas Pelayanan Administrasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur*. 2(2), 61–71.
- Mandang, E. F., Lumanauw, B., & Walangitan, M. D. . (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(3), 4324–4334.
- Nasution, S. (1999). *Sosiologi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- R.A. Supriyono. (2006). Pengaruh Usia, Keinginan Sosial, Kecukupan Anggaran, Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Kinerja Manajer Di Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 21(1), 59–74.
- Rachman, S., & Afrizal, A. (2022). *Hasil Wawancara Kabid dan Kasi Linmas*. Ravianto. (2014). *Produktivitas dan Manusia Indonesia*. SIUP.
- Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
- Satpol PP Jabar. (2022a). *Hasil Laporan Cepat*.
- Satpol PP Jabar. (2022b). *Rekapitulasi Data Demografi PNS Satpol PP Provinsi Jawa Barat*.
- Seretta, I. R. (2022). *Apa Itu Google Forms, Fungsi, dan Cara Membuatnya*. Cermati.Com

### Internet

<https://www.cermati.com/artikel/yuk-cari-tahu-apa-itu-google-forms-fungsi-dan-cara-membuatnya>

### Peraturan Perundang-Undangan

Pergub No. 54. (2016). *Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja*.